

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu masalah serius dalam pembangunan nasional di Indonesia yang sepertinya sulit diatasi secara menyeluruh. Selama ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, tetapi hasilnya belum optimal. Upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan ini dilakukan demi mencapai cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Attamimi (2021) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia. Negara juga menjamin hak-hak terkait kehidupan yang layak. Masih sering kita temui bahwa beberapa orang belum mendapatkan hak-hak tersebut, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial atau ekonomi. Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang yang setara untuk maju dan memberikan kehidupan layak dalam kehidupannya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Utomo (2014) menyatakan bahwa rendahnya kualitas hidup keluarga miskin berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas mereka. Oleh karena itu, upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Menurut Bowling dalam Asbar dan Mawarpury (2018) kriteria kualitas hidup yang baik yaitu memiliki pandangan positif secara psikologis, kesejahteraan emosional, kesehatan fisik dan mental yang optimal, kemampuan fisik hubungan interpersonal yang berkualitas, partisipasi dalam kegiatan sosial dan rekreasi, tinggal di lingkungan yang aman dengan fasilitas yang memadai, serta keberlanjutan finansial dan mandiri.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36 persen dari total populasi atau setara dengan 25,9 juta orang. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak mencapai 13,62 juta orang. Jawa Timur menonjol sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu 4,18 juta orang. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat dengan jumlah 3,88 juta dan Jawa Tengah dengan jumlah 3,79 juta orang. Fenomena ini dapat menggambarkan populasi penduduk miskin yang tertinggi di Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Negara perlu senantiasa menghormati dan menjaga martabat hak masyarakat agar dapat berkembang mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hak-hak dalam masyarakat Indonesia tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak tersebut bagi seluruh rakyatnya.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat kurang mampu dianggap sebagai kewajiban negara Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Pemerintah perlu mengambil tindakan serius untuk mengatasi isu kemiskinan dan merancang kebijakan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara setara dan adil.

Pangan adalah kebutuhan fundamental bagi manusia yang harus terpenuhi karena memberikan energi yang dibutuhkan untuk menjaga kehidupan. Hak untuk mendapatkan makanan adalah bagian tak terpisahkan dari hak-hak dasar manusia. Pangan sebagai kebutuhan pokok hak dasar manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Bagi keluarga miskin pengeluaran untuk kebutuhan makanan mengonsumsi sebagian besar pendapatan dan tambahan pendapatan dibandingkan dengan keluarga yang lebih berkecukupan. Pemberian bantuan makanan menjadi salah satu langkah untuk memastikan bahwa semua yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi dapat mengakses makanan bergizi dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah membuat program Bantuan Pangan Non Tunai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, yang disebut dengan BPNT adalah jenis bantuan langsung yang diberikan secara non-tunai kepada KPM setiap bulannya. Bantuan ini hanya dapat digunakan untuk membeli sembako dan kebutuhan pokok rumah tangga. BPNT diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada dalam 25 persen terbawah kondisi sosial ekonomi di wilayah yang melaksanakan program tersebut.

Program BPNT ini diarahkan dapat mengurangi pola pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian beras subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk meringankan biaya hidup rumah tangga penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan makanan.

Mekanisme distribusi BPNT dilakukan melalui akun elektronik. Penerima bantuan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera bisa menggunakan kartu tersebut untuk belanja bahan makanan di e-warong terdekat. E-warong ini adalah agen bank, pedagang, atau mitra lain yang bekerja sama dengan bank yang menyediakan bantuan tersebut. BPNT bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Farquhar yang dikutip oleh Adi Fahrudin (2014) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial selalu terkait dengan konsep kualitas hidup. Definisi dan pengukuran kualitas hidup memiliki variasi yang signifikan di antara berbagai disiplin ilmu dan bahkan di dalam disiplin tersebut sendiri.

Cummin & Liitchers dalam Appulembang dan Dewi (2017) mendefinisikan bahwa kesejahteraan dapat diukur melalui indeks kualitas hidup. Konsep kualitas hidup menurut WHO (2012) merujuk pada bagaimana individu menilai keadaan mereka dan pengalaman hidup mereka secara menyeluruh, dalam konteks nilai budaya dan sistem di sekitar mereka. Kualitas hidup mencakup aspek kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan dari kehidupan seseorang

Desa Gedangsewu merupakan desa yang menerima program Bantuan Pangan Non Tunai sejak tahun 2018, selain BPNT ada juga bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Seiring berjalannya waktu di Desa Gedangsewu terus mengalami perkembangan salah satu bentuk perkembangannya adalah jumlah warga miskin yang mendapat bantuan. Terdapat 308 KPM yang mendapatkan manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai yang tersebar wilayah Desa Gedangsewu.

Berdasarkan pengamatan lapangan terhadap masyarakat penerima BPNT, banyak dari mereka yang belum dapat optimal dalam memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Saat ini kebanyakan KPM memiliki anak yang sedang bersekolah. Beberapa KPM masih ada yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, hal tersebut dikarenakan jumlah penghasilan KPM masih sangat rendah. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh dan berdagang.

Bantuan yang diberikan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka karena jumlah kebutuhan anggota keluarga melebihi jumlah bantuan yang diterima. Selain itu, beberapa KPM yang sudah mendapat bantuan BPNT masih hutang ke bank emok bahkan ada yang menjual lagi bantuannya. Namun, ada KPM yang mendapat BPNT dapat tercukupi dan memanfaatkan bantuan dengan baik untuk kehidupan sehari-hari.

Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aspar pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Hasilnya implementasi Program BPNT di Kelurahan Bontoduri telah sukses dan berhasil mencapai targetnya. Namun, masih ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan bulanan, sehingga bantuan tersebut dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulanan Keluarga Penerima Manfaat BPNT.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu dengan menggunakan instrumen WHOQoL-BREF dari WHO yang sudah diadaptasi meliputi aspek kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan hidup sehingga dapat menggambarkan seberapa baik kualitas hidup keluarga penerima manfaat penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kualitas hidup keluarga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu?" Agar penelitian menjadi lebih terstruktur, masalah tersebut dapat dijabarkan menjadi sub-sub masalah berikut ini:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana kesehatan fisik Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu?
3. Bagaimana kondisi psikologis Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu?
4. Bagaimana hubungan sosial Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu?
5. Bagaimana lingkungan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kualitas hidup keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu. Kemudian Tujuan khusus dari penelitian ini agar memperoleh gambaran mengenai:

1. Mengetahui karaktersitik responden;
2. Mengetahui kesehalaan fisik Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu;
3. Mengetahui kondisi psikologis Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu;
4. Mengetahui hubungan sosial Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu;
5. Mengetahui lingkungan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu;

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan dari permasalahan di atas, diharapkan bahwa dapat diperoleh hasil yang bermanfaat, mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini adalah uraian mengenai manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan penjelasan ilmiah untuk pengembangan praktek pekerjaan sosial terkait dengan kemiskinan, khususnya terkait dengan kualitas hidup keluarga penerima manfaat BPNT. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan deskripsi yang lebih rinci mengenai kualitas hidup keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau rekomendasi dalam bentuk ide dan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan, khususnya terkait dengan kualitas hidup keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Gedangsewu. Selain itu, sebagai salah satu elemen dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan terkait program Bantuan Pangan Non Tunai.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proposal Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I** : Pendahuluan memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II** : Kajian konseptual memuat tentang penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori yang relevan tentang evaluasi, kualitas hidup, kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tunai, pekerjaan sosial dengan kemiskinan, dan kerangka pikir.
3. **BAB III** : Metode penelitian memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.